

SUMPAH PEMUDA 1928 - SUMPAH MAHASISWA 1995

ALOYSIUS PURWA HADIWARDYOY, MSF

Pada zaman yang cepat berubah seperti yang sedang kita alami sekarang ini, perubahan menyentuh begitu banyak bidang, termasuk bidang kepemudaan. Karena itu kiranya berguna untuk mempertanyakan, manakah perjuangan yang layak kita harapkan pada diri para pemuda kita, demi masa depan seluruh bangsa.

Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan itu dengan membandingkan semangat para pemuda pada tahun 1995 ini dengan semangat para pemuda pada tahun 1928 yang terkenal dengan sumpah mereka. Dengan perbandingan itu, kiranya kita dapat melukiskan, manakah perjuangan orang muda tahun 1995 yang pantas kita dukung karena sesuai dengan tuntutan keadaan masyarakat kita dewasa ini.

Sumpah Pemuda 1928 dan Sumpah Mahasiswa 1995

Dari sekian banyak kongres pemuda Indonesia, kongres pemuda kedua yang diselenggarakan pada tahun 1928 merupakan kongres yang paling terkenal sampai saat ini. Sebab dalam kongres itulah para peserta menyampaikan sumpah yang berhasil menyemangati kaum muda seluruh Nusantara untuk mencapai cita-cita yang luhur dan sekaligus amat mendesak, yakni adanya satu bangsa yang satu pula tanah air dan bahasa nasionalnya. Semangat yang ditimbulkan oleh sumpah tersebut begitu hebat sehingga akhirnya perjuangan mereka menghasilkan kemerdekaan RI pada tahun 1945. Tanpa adanya sumpah pemuda 1928 itu, mungkin tak terjadi proklamasi kemerdekaan 1945!¹

1. Hubungan antara Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan RI 1945 a.l. ditegaskan oleh Sunario, salah satu pemrasaran dalam Kongres Pemuda-Pemuda

Di balik trilogi Sumpah Pemuda itu, ada satu nilai yang kiranya jauh lebih berharga daripada bunyi sumpah itu sendiri, yakni semangat kebangsaan. Sebelum tahun 1928 itu, para pemuda kita terkotak-kotak dalam kelompok-kelompok yang didasari suku atau agama tertentu. Semangat kesukuan atau fanatisme agama masih lebih berakar daripada semangat kebangsaan. Waktu itu kesadaran kebangsaan belum cukup kuat dan hanya sungguh hidup dalam hati sebagian kecil dari masyarakat kita. Berbagai pemberontakan maupun perjuangan melawan penjajah Belanda lebih didorong oleh kepentingan kelompok daripada oleh semangat kebangsaan. Syukurilah, kebangkitan nasional yang dipelopori oleh gerakan Budi Utomo pada tahun 1908 ternyata dapat berkembang semakin matang di kalangan para pemuda dalam bentuk semangat kebangsaan, yang terungkap dalam trilogi sumpah pemuda pada tahun 1928 itu.²

Sekian puluh tahun sesudah pengucapan sumpah pemuda tersebut, yakni pada pembukaan Pertemuan Nasional Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi se-Indonesia di Ujungpandang pada tanggal 17 April 1995, diucapkan Sumpah Mahasiswa 1995. Sayang, sumpah itu tidak begitu bergema dalam media massa maupun dalam pembicaraan kaum muda pada umumnya. Mungkin karena isinya tidak disukai oleh para penguasa, dan para wartawan kurang mampu menyerap aspirasi yang tersembunyi di balik sumpah tersebut. Padahal, isinya tidak kalah luhur bila dibandingkan dengan trilogi Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Mahasiswa 1995 itu berbunyi: "Kami mahasiswa Indonesia mengaku: bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan; berbangsa satu, bangsa yang menjunjung tinggi keadilan; berbahasa satu, bahasa kebenaran".³

Sebenarnya Sumpah Pemuda 1928 dan Sumpah Mahasiswa 1995 itu mengungkap perjuangan yang sama, yakni kepedulian pada nasib rakyat banyak, yang sedang menderita kemalangan dan memerlukan bantuan orang lain untuk menyuarkan kepentingan mereka. Orang-orang muda itu menjadi semacam corong bagi seluruh rakyat, terutama

Indonesia II yang membuahakan Sumpah Pemuda 1928, dalam artikelnya berjudul "Arti Sumpah Pemuda: Nasional dan Internasional", dlm: Luhur, Rufinus dan Babari, J. (Penyunting), *Pemuda dan Masa Depan*, CSIS, Jakarta 1987, hlm. 3-11.

2. Tentang hubungan antara Sumpah Pemuda 1928 dan semangat kebangsaan, lihat misalnya artikel Rufinus Luhur yang berjudul "Belajar dari Kepeloporan Pemuda 1928", dlm: Luhur, Rufinus dan Babari, J. (Penyunting), *op. cit.*, hlm. 29-50.

3. Lihat berita dalam surat kabar BERNAS, tanggal 18 April 1995.

ma rakyat jelata, yang tidak mampu dan tidak berani berbicara. Namun demikian, kepedulian itu mempunyai arah perjuangan yang agak berbeda. Sumpah Mahasiswa 1995 menunjukkan arah perjuangan baru, suatu perkembangan dari Sumpah Pemuda 1928. Mungkin arah baru itu dapat disebut nasionalisme humanis, sebagai perkembangan yang wajar dari nasionalisme politiko-kultural, yang terungkap dalam Sumpah Pemuda 1928.

Perkembangan semacam itu sungguh menggembirakan. Setelah 50 tahun bangsa kita merdeka, sudah layaklah bahwa para mahasiswa sebagai juru bicara seluruh rakyat itu memperjuangkan suatu semangat yang lebih luas daripada sekadar nasionalisme politiko-kultural, yakni nasionalisme humanis.

Menuju Nasionalisme Humanis

Baik nasionalisme politiko-kultural yang terungkap dalam Sumpah Pemuda 1928, maupun nasionalisme humanis yang terungkap dalam Sumpah Mahasiswa 1995 merupakan nilai yang baik dan benar sejauh sungguh-sungguh dimengerti dan dihayati secara tepat. Walaupun demikian, nasionalisme humanis kiranya merupakan nilai yang lebih tinggi daripada nasionalisme politiko-kultural. Sebab nasionalisme politiko-kultural hanya memperjuangkan kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa. Sedangkan nasionalisme humanis tidak puas dengan hal-hal itu saja. Nasionalisme humanis masih menuntut adanya kebebasan, keadilan sosial, dan kebenaran.

Hal pertama yang dicita-citakan oleh para peserta Pertemuan Nasional Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi di Ujungpandang pada tanggal 17 April 1995 adalah tanah air tanpa penindasan. Setelah 50 tahun kemerdekaan RI, setelah Irian Jaya maupun Timor Timur kembali ke pangkuan ibu pertiwi, cita-cita para pemuda pada tahun 1928 akan kesatuan tanah air sudah tercapai. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa para mahasiswa pada tahun 1995 mengembangkan cita-cita para pendahulu mereka itu menuju tanah air tanpa penindasan. Sebab, apa gunanya merebut tanah air dari penjajah bila rakyat ganti tertindas oleh para penguasa dari bangsa sendiri?⁴

4. Tentang hubungan antara hak-hak asasi manusia dan penindasan politis, lihat artikel JB. Banawiratma yang berjudul "Hak-Hak Asasi Manusia" dlm: Banawiratma, JB. *et al.* (Penyunting), *Merawat & Berbagi Kehidupan*, Yogyakarta, Kanisius, 1994, hlm. 134-144.

Dewasa ini para mahasiswa menilai adanya penindasan rakyat jelata oleh para penguasa bangsa sendiri. Hal itu antara lain disimpulkan dari adanya larangan berpolitik di kampus, larangan berseminar, penangkapan pengunjung rasa, dan pencekalan tokoh-tokoh yang vokal. Pada waktu para mahasiswa atau orang-orang muda lain mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat, mereka tidak mendapat tanggapan dan perlindungan yang memadai. Para penanggungjawab media massa tidak begitu berani memberitakan dan mendukung perjuangan mereka karena takut akan ditindak oleh yang berkuasa. Bahkan rektor atau para pejabat perguruan tinggi mereka sendiri seringkali cuci tangan atau malah menghalangi mereka untuk menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, dengan alasan bahwa kampus bukanlah medan untuk politik praktis.

Hal kedua yang dicita-citakan dalam Sumpah Mahasiswa 1995 adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan. Keadilan yang dicita-citakan itu terutama adalah keadilan sosial, bukan hanya keadilan komutatif antarpribadi. Sebab, walaupun keadilan komutatif itu cukup penting dan berharga, keadilan sosial toh lebih mendesak untuk diperjuangkan. Terlebih lagi, ketidakadilan sosial itu menimbulkan penderitaan pada jauh lebih banyak orang dan jauh lebih sulit diatasi daripada ketidakadilan komutatif yang bersifat individual.

Para mahasiswa menilai bahwa ketidakadilan sosial yang menggejala dalam masyarakat kita dewasa ini merupakan akibat dari struktur sosial yang tidak menghargai kesamaan martabat setiap orang, kesamaan martabat setiap warga bangsa. Struktur sosial masyarakat kita dewasa ini dinilai sebagai struktur yang menempatkan para penguasa dan keluarga mereka lebih tinggi daripada rakyat jelata. Struktur masyarakat seperti itu merupakan kelanjutan dari struktur feodal zaman dahulu yang dilestarikan dalam bentuk modern. Karena itu, para mahasiswa menuntut adanya pembaruan struktur sosial. Mereka sadar, bahwa ketidakadilan sosial hanya dapat diatasi dengan menghapus struktur yang tidak adil itu.⁵

Hal ketiga yang dicita-citakan dalam Sumpah Mahasiswa 1995 adalah bahasa kebenaran, sebagai pengembangan dari bahasa nasio-

5. Adnan Buyung Nasution menegaskan bahwa keadilan sosial itu dapat didukung dengan perumusan dan pelaksanaan hukum yang adil, yang menjamin hak-hak asasi tiap warga negara. Lihat artikelnnya yang berjudul "Pembangunan Hukum Yang Berorientasi Keadilan" dlm: Banawiratma, JB. *et al.* (Penyunting), *op.cit.*, hlm. 145-153.

nal yang dicita-citakan dalam Sumpah Pemuda 1928, suatu pengembangan yang kiranya layak didukung oleh siapa pun. Sebab, apakah gunanya bahasa nasional bila bahasa itu tidak mendukung kebenaran? Bukankah bahasa adalah alat untuk menyampaikan kebenaran?

Para mahasiswa melihat bahwa, dalam masyarakat kita dewasa ini, bahasa nasional ternyata tidak menjamin kebenaran dalam komunikasi antar-warga bangsa. Para penguasa seringkali menggunakan bahasa untuk mengelabui rakyat. Sementara itu, sebagian dari rakyat lebih suka membuat laporan dengan bahasa palsu, bahasa yang disenangi para penguasa, agar tidak menerima akibat yang berat. Dalam suasana seperti itulah para mahasiswa memperjuangkan bahasa kebenaran. Mereka mengharapkan bahwa siapa pun, baik penguasa maupun rakyat, menggunakan bahasa demi kebenaran. Bahasa janganlah dipakai untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk menjamin kepentingan kelompoknya sendiri, melainkan untuk mempersatukan bangsa dan menyampaikan kebenaran.⁶

Nasionalisme dan Humanisme

Sudah terbukti berulang kali dalam sejarah peradaban manusia, bahwa nasionalisme seringkali dimengerti dan dihayati secara sempit serta menjadi semacam pendewaan terhadap bangsa sendiri sambil melecehkan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa yang sedang memusuhi atau dimusuhi. Dalam skala yang besar, cukuplah kiranya kalau kita mengingat nasionalisme Jerman di bawah pimpinan Hitler dan nasionalisme Italia di bawah pimpinan Mussolini.⁷ Dalam skala yang lebih kecil, cukuplah kiranya kalau kita mengingat bagaimana pemerintah kita secara emosional membantah setiap kritik dari luar negeri terhadap kekurangan pemerintah kita dalam menghormati hak-hak

6. Bernhard Häring menulis tentang bahasa kebenaran dalam manual teologi moral yang ditulisnya, yang berjudul *Free and Faithful in Christ*, vol. II, Slough, St. Paul Publications, 1979, hlm. 7-100.

7. Perlu dibedakan antara nasionalisme sempit dari Adolf Hitler dan nasionalisme wajar dari Charles De Gaulle. Tentang hal ini dapat dibaca artikel J.R. Sutardjo Adisusilo yang berjudul "Nasionalisme Tetap Relevan: Studi kasus Nasionalisme Charles De Gaulle" dalam majalah ilmiah *Widya Dharma* yang diterbitkan setahun dua kali oleh Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta, edisi Th. V nomor 1, Oktober 1993, hlm. 21-46.

asasi manusia rakyatnya. Walaupun demikian, asalkan dimengerti dan dihayati secara tepat, nasionalisme tetap merupakan nilai yang penting dan berguna. Tanpa nasionalisme, sulit tercapai kemerdekaan bangsa dan akan sulit pula tercapai kebebasan bagi semua warganya. Yang perlu diusahakan ialah bahwa nasionalisme yang memperjuangkan kepentingan bangsa sendiri itu tidak merendahkan kepentingan bangsa-bangsa lain.

Justru demi sehatnya nasionalisme itulah, diperlukan humanisme sebagai pengembangannya. Kedua nilai itu tidak bertentangan dan tidak perlu pula bersaing. Malah sebaliknya, nasionalisme dan humanisme dapat saling melengkapi dan dipersatukan dalam nasionalisme yang humanis. Nasionalisme yang sehat memberikan lingkup historis dan geografis yang nyata pada penghayatan humanisme. Dengan nasionalisme orang dapat mencintai bangsa, negara, tanah air, dan bahasa nasionalnya sendiri. Sedangkan dengan humanisme orang dapat mencintai sesama, dari suku atau bangsa mana pun juga.⁸

Humanisme mendorong orang untuk berpikir tentang semua orang dengan martabat dan hak-hak asasi mereka sebagai manusia. Padahal, nasionalisme dapat membuat orang hanya berpikir tentang kepentingan bangsanya sendiri, tanpa mempedulikan kepentingan bangsa-bangsa lain. Nasionalisme sempit hanya menghargai martabat dan hak-hak dari bangsa dan orang-orang sebangsanya sendiri. Seorang nasionalis fanatik marah kalau bangsanya dirugikan, tetapi tidak merasa salah bila bangsanya merugikan bangsa-bangsa lain. Sedangkan seorang humanis malu bila bangsanya kurang menghargai hak-hak asasi manusia dan malu juga bila bangsanya kurang menghargai bangsa-bangsa lain.

Tentu saja seorang humanis seperti itu tidak dapat muncul dengan sendirinya, melainkan hanya setelah melalui pendidikan oleh banyak orang lain dan usaha pembinaan diri. Pendidikan ke arah humanisme itu bahkan jauh lebih sulit daripada gemblengan ke arah nasionalisme sempit sebab mencintai semua orang dari segala bangsa itu lebih sulit daripada mencintai sesama warga bangsa sendiri.

8. Tentang hubungan antara pembangunan nasional dan nilai-nilai dasar manusia, lihat misalnya artikel A. Sudiarjo yang berjudul "Globalisasi dan Nilai Dasar Manusia dalam Pembangunan" dalam majalah ilmiah *Widya Dharma* edisi Th. V nomor 1, Oktober 1994, hlm. 15-26.

Walaupun demikian, pendidikan ke arah humanisme itu harus sungguh diusahakan, mengingat nilainya yang tinggi. Humanisme merupakan nilai yang lebih tinggi dan lebih luas daripada nasionalisme karena merupakan nilai universal dan abadi, bukan hanya suatu nilai yang terbatas dan sementara saja. Pendidikan semacam itu memuat usaha menumbuhkan semangat cinta sejati kepada setiap orang berdasarkan keyakinan mendalam akan tingginya martabat setiap orang dalam keadaan apa pun. Tanpa cinta yang sejati dan tanpa pengakuan akan martabat setiap orang, tidak mungkinlah humanisme itu bertumbuh dan menghasilkan buah.⁹

Karena usaha pendidikan juga membutuhkan teladan, humanisme hanya dapat dikembangkan dengan contoh sikap yang nyata, bukan hanya dijelaskan melalui informasi atau dipaksakan lewat indoktrinasi. Sayang, para penguasa dalam masyarakat kita seringkali justru memberi contoh buruk, contoh nasionalisme sempit, karena mereka cepat marah bila mereka dikritik oleh bangsa-bangsa lain karena dinilai kurang menghormati hak-hak asasi rakyatnya sendiri.

Walaupun begitu, baiklah kalau kita catat pula, bahwa setelah 50 tahun bangsa kita merdeka, semangat kebangsaan tetap perlu ditumbuhkan, walaupun dalam arti nasionalisme humanis, bukan hanya nasionalisme politiko-kultural. Sebab, tanpa nasionalisme, humanisme yang universal itu juga akan sulit ditumbuhkan.

Nasionalisme Yahudi dan Humanisme Kristen

Sumpah Pemuda 1928 dan Sumpah Mahasiswa 1995 itu barangkali dapat kita bandingkan dengan nasionalisme Yahudi dan humanisme kristen, seperti dapat kita simpulkan dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Dalam sabda maupun karya-Nya, Yesus tidak menampilkan diri sebagai seorang nasionalis yang berambisi untuk mengusir penjajah Romawi dari tanah Israel. Suatu ketika Ia malah sengaja menghindar ketika Ia disambut orang banyak untuk dijadikan raja. Ia juga melarang para murid-Nya menyampaikan kepada orang-orang bahwa Ia itu Mesias, agar Ia tidak ditafsirkan sebagai calon raja

9. Tentang pendidikan nilai, lihat Kaswardi, EM.K.(Penyunting), *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, Komisi Pendidikan KWI/MNPK dan Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 1993, dan Banawiratma, JB., *Iman, Pendidikan dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Kanisius, 1991.

seperti Daud leluhur-Nya. Ia ingin membebaskan manusia secara penuh, bukan hanya secara politis. Ia membebaskan orang dari setan, dari dosa, dari penyakit dan kematian, dari isolasi dan dari legalisme.¹⁰

Cita-cita mahasiswa 1995 untuk memiliki tanah air tanpa penindasan itu memuat nilai luhur yang pantas didukung oleh umat beriman dari agama mana pun, termasuk umat kristen. Agama kristen selalu meyakini dan mewartakan bahwa setiap manusia, dalam usia dan kondisi mana pun, adalah citra dan anak Allah. Setiap manusia dianugerahi oleh Sang Pencipta sendiri kebebasan untuk bertindak menurut keyakinan hati nurani, sesuai dengan martabatnya sebagai citra dan anak Allah itu. Oleh karena itu, setiap penindasan harus dilawan dan diberantas karena kurang menghormati atau bahkan mengingkari martabat luhur tersebut.¹¹

Sang Pencipta tidak hanya menciptakan manusia sebagai citra-Nya, melainkan juga memberi martabat yang sama kepada semua manusia, dari jenis kelamin atau usia mana pun. Karena itulah, umat kristen menuntut dan memperjuangkan keadilan bagi siapa pun. Keadilan itu tidak hanya dalam arti keadilan komutatif antar-individu, melainkan juga dalam arti keadilan sosial, keadilan yang mengena banyak orang. Ketidakadilan sosial harus dilawan dan diberantas karena bertentangan dengan kesamaan martabat semua manusia dan menimbulkan penderitaan pada begitu banyak orang, terutama pada rakyat jelata. Pewahyuan kristen menyatakan bahwa kesamaan martabat manusia itu merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan karya keselamatan karena telah dikaburkan oleh dosa. Dosa membuat orang bersikap diskriminatif.¹²

Tentang kebenaran, Tuhan Yesus memperkembangkan ajaran yang sudah ada dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab itu salah satu perintah Allah adalah larangan untuk bersaksi dusta. Larangan itu, sekurang-kurangnya secara harfiah, hanya menuntut kebenaran dalam

-
10. Tentang karya pembebasan Yesus lihat Wijngaards, John, *Yesus Sang Pembebas*, (terjemahan A. Widyamartaya), Yogyakarta, Kanisius, 1994.
 11. Lihat Magnis-Suseno, Franz, *Beriman Dalam Masyarakat. Butir-Butir Teologi Kontekstual*, Yogyakarta, Kanisius, 1993, dan Sobrino, Jon dan Pico, Juan Hernandez, *Teologi Solidaritas*, (terjemahan Bosco Carvallo), Yogyakarta, Kanisius, 1989.
 12. Lihat Dopo, Eduard R. (Penyunting), *Keprihatinan Sosial Gereja*, Yogyakarta, Kanisius, 1992.

rangka memberi kesaksian dalam pengadilan, agar tidak ada orang yang dijatuhi hukuman atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Akan tetapi, Yesus menuntut kebenaran dalam *seluruh* hidup manusia. Ia meminta kepada para murid-Nya agar mereka mengatakan *ya*, bila memang *ya*, dan berkata *tidak* jika memang *tidak*.¹³

Penutup

Sebagai penutup, kiranya boleh kita tegaskan, bahwa cita-cita kaum muda yang terungkap dalam Sumpah Mahasiswa 1995 pantas didukung oleh umat beriman karena memperjuangkan nilai-nilai humanis yang sesuai dengan martabat luhur setiap orang dan sungguh menjawab kebutuhan rakyat banyak dalam masyarakat kita dewasa ini. Dukungan itu makin perlu sebab posisi kaum muda dalam masyarakat kita amat lemah, terutama dibandingkan dengan para penguasa!

13. Lihat penjelasan tentang hal ini dalam Kieser, Bernard, *Paguyuban Manusia Dengan Dasar Firman*, Yogyakarta, Kanisius, 1991, hlm. 105-116.